

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang di selenggarakan oleh pemerintah adalah puskesmas dan Rumah Sakit. Fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta masyarakat juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. Dalam konteks pelayanan, pemerintah memang sudah harus menerapkan sistem jempit bola, dan bukan hanya menunggu bola. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dibutuhkan pembiayaan kesehatan yang cukup, guna memenuhi hak mendasar masyarakat tersebut.

Program kesehatan gratis secara teori di Indonesia adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS merupakan program yang memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. KIS juga memberikan layanan preventif, promotif, dan deteksi dini. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu di benahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap individu dan semua warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Program jaminan sosial pada dasarnya adalah sebuah program untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana negara dan masyarakat secara bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya (Sin, 2022).

Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya kesehatan merupakan bentuk untuk mewujudkan masyarakat dengan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih agar terhindar dari berbagai penyakit karena perhatian masyarakat mulai menyadari akan kerusakan lingkungan hidup yang akan berdampak pada

kesehatan masyarakat. Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sejahtera adalah ketika seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi melalui berbagai usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kesejahteraan menjadi fokus pembangunan pemerintah dengan tujuan terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan, sebagai salah satu instrumen pengukur keberhasilan pembangunan, memiliki beberapa indikator, yaitu kependudukan kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya (Bustamam et al., 2021).

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang sendiri, dalam lingkup Eks Karesidenan Surabaya, memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga. Hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, pada tahun 2022 penduduk di Kabupaten Jombang mencapai 1.335,97 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 0,80 persen dari jumlah penduduk tahun 2021. Apabila ditinjau dari tingkat kepadatannya, dalam satu kilometer persegi wilayah Kabupaten Jombang dihuni oleh sebanyak 1.198 jiwa. Jombang adalah wilayah terpadat ke lima dalam eks Karesidenan Surabaya setelah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. Kota Mojokerto, meskipun memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, namun karena luas wilayah yang kecil menyebabkan tingkat kepadatannya tinggi kedua. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan pemerataan layanan kesehatan. Selain mudah dijangkau oleh masyarakat,

pelayanan kesehatan hendaknya juga tersedia dengan murah. Oleh karena itu pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang berkompoten yang dapat dijumpai di fasilitas tersebut telah diupayakan selama ini. Selain itu berbagai program kesehatan gratis juga digalakkan oleh pemerintah agar dapat menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah. Salah satu hal yang menyebabkan masyarakat enggan berobat di faslitas kesehatan adalah perihal biaya. Meskipun demikian, masalah ini telah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Layanan BPJS Kesehatan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dengan menjadi peserta mandiri. Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu dapat ditampung dalam peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI). Dengan demikian, besaran biaya pengobatan diharapkan tidak lagi menjadi halangan bagi masyarakat yang tidak mampu yang ingin berobat. Selama 2018-2021, masyarakat yang berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan paling banyak terjadi pada tahun 2020. Di Jombang pada tahun tersebut sendiri sekitar 35,01 persen penduduk yang berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan, sedangkan di wilayah Jawa Timur mencapai sekitar 35,75 persen. Bergerak menuju tahun 2022, persentase penduduk Jombang yang berobat jalan dengan memanfaatkan jaminan kesehatan menurun menjadi 30,55 persen di tahun 2021 dan meningkat menjadi 34,71 persen ditahun 2022 Setelah dipetakan menurut jenis kelamin, dapat diperoleh

informasi bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, penduduk perempuan yang lebih banyak memanfaatkan jaminan kesehatan jika dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali pada tahun 2019. Pada 2020 persentase pengguna jaminan kesehatan yakni sekitar 32,65 persen dari penduduk laki-laki yang berobat jalan dan 37,02 persen dari penduduk perempuan yang berobat jalan. Kemudian pada 2021, pengguna jaminan kesehatan yakni sekitar 29,81 persen dari penduduk laki-laki yang berobat jalan dan 31,52 persen dari penduduk perempuan yang berobat jalan (Trisnantoro, 2021).

Indikator kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang diantaranya adalah kesehatan, dapat diketahui bahwasanya tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Jombang sudah cukup tinggi. Selain itu pemerintah menyediakan program layanan kesehatan melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan tujuan peningkatan kesehatan masyarakat daerah terkhusus kepada ibu hamil, balita, ibu menyusui, batita, remaja dan lansia. Seperti disediakannya Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Obat Desa (POD) dll. maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Program Kesehatan gratis dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di wilayah Puskesmas Jogoroto kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana program kesehatan gratis di Wilayah Puskesmas Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Puskesmas Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?
3. Apa ada hubungan antara Program Kesehatan Gratis Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Puskesmas Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengetahui tujuan pembahasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja program kesehatan gratis di Wilayah Puskesmas Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Puskesmas Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
3. Mengetahui hubungan antara Program Kesehatan Gratis Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Puskesmas Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan program kesehatan gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan gratis.

### 2. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritik, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

